



Pranatan Anyar



USAI DISUNTIK VAKSIN COVID-19

Wapres Ma'ruf Amin Tidak Merasakan Efek

JAKARTA (KR) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, tidak merasakan efek setelah menerima suntikan vaksin Covid-19 di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Rabu (18/2).

"Alhamdulillah tidak ada masalah, tidak sakit, tidak ada rasa pusing, biasa-biasa saja. Saya kira (akan ada efek), ternyata vaksin ini Insya Allah tidak menimbulkan efek apa-apa," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Karena itu Wapres mengajak seluruh masyarakat, khususnya kelompok lanjut usia (lansia), untuk ikut mensukseskan Program Vaksinasi Covid-19 Nasional dengan menerima suntikan vaksin.

"Saya ajak semuanya, mari kita ikut melaksanakan vaksinasi, karena ini diharapkan bisa menjadikan masyarakat Indonesia mengalami kekebalan terha-



Ma'ruf Amin

dap Covid-19. Kita belum tahu Covid-19 ini sampai kapan," ujar Wapres.

Penyuntikan vaksin Covid-19 kepada Wapres dilakukan oleh dr Dwi Edi Wahono SpDD KGH disaksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo.

Dwi Edi Wahono mengaku sedikit canggung saat menyuntikkan vaksin ke lengan kiri Wapres, namun ia juga merasa bangga bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

"Agak grogi, tapi saya bangga bisa dipercaya untuk melayani Bapak (Wapres) melakukan vaksinasi, apalagi ini adalah kelompok lansia yang sangat rentan dengan infeksi Covid-19 dan harus kita lindungi bersama," ujar Wahono. (Ati/Sim)-f

SIDAK PROKES COVID-19

WO Keluhkan Pungli Event Pernikahan

YOGYA (KR) - Pada masa pandemi Covid-19, event pernikahan dilaksanakan terbatas dengan disiplin protokol kesehatan (prokes). Namun sangat disayangkan, ada oknum petugas pengamanan Gugus Tugas Covid-19 dengan dalih melakukan inspeksi mendadak (sidak) mencoba mencari keuntungan dengan meminta pungutan terhadap Wedding Organizer (WO). Hal ini dirasa memberatkan para pengelola WO.

"Informasi dan laporan dari berbagai sumber anggota WO, sangat meresahkan dan mengganggu. Dengan jumlah tidak pasti orangnya dan bisa bergantian datangnya antara 10-15 orang berseragam petugas keamanan dan pakaian bebas mendatangi event pernikahan yang kita gelar," ungkap Ketua Ikatan Pengusaha Pesta Tradisional Yogyakarta (Ikappesty) Stanlus Julian kepada KR, Rabu (17/2).

Pimpinan Kapulaga Planner & Organizer ini menyebutkan, awal-

nya mereka datang bergantian meminta makanan berupa nasi dus. "Ini masih bisa ditolerir. Tetapi akhirnya mereka minta diopeni dengan amplop. Sempat terjadi perdebatan-perdebatan yang akhirnya teman-teman memberikan amplop, yang kami pikir termasuk pungli," ujarnya.

Ketua Gabungan Penyelenggara Pernikahan Yogyakarta (GAPPY) Ki Abeje Janoko menyatakan, keluhan dari para WO yang mensyalir adanya pungli dari oknum petugas

pengamanan Gugus Tugas Covid-19 saat ini dalam pengumpulan bukti-bukti. "Jangan sampai ada beda makna, tugas Gugus Tugas Covid-19 mendukung bagaimana penyelenggaraan acara pernikahan disiapkan sesuai protokol kesehatan dan tidak boleh *menjustice*, menyatakan salah atau benar. Tapi bagaimana dicari solusi agar pelaksanaan hajatan aman dan terbebas dari Covid-19," ujarnya.

Sebab, jika Gugus Tugas Covid-19 seolah menjadi penentu salah benarnya event yang dijalankan, bisa disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. "Kita akan duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini. Oknum yang melanggar bisa dikenakan sanksi, aparat dan masyarakat harus kompak dan bekerja sama dalam mengatasi Covid-19," ujarnya. (R-4)-f

KASUS COVID-19 DI INDONESIA

Banyak Data Negatif Tak Dilaporkan

JAKARTA (KR) - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, banyak data negatif Covid-19 yang tidak dilaporkan. "Kami mengamati, banyak data mengenai hasil tes usap PCR kalau sifatnya negatif belum langsung dikirim ke pusat, sehingga data yang kami terima itu lebih banyak data yang positif," ujar Menkes dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (17/2).

Hal itu, menurut Menkes, dinilai berakibat pada peningkatan *positivity rate* Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan data per Selasa (16/2) pukul 12.20 WIB, *positivity rate* Covid-19 Indonesia mencapai 38,4 persen. Nilai itu didapat dari pembagian antara kasus positif 1.233.959 dengan orang yang dites sebanyak 6.721.920.

"Karena jumlah datanya demikian banyak dan juga *user interface* atau cara memasukkan ke aplikasi kita masih rumit, itu mengakibatkan banyak yang memasukkan data yang positif dulu sehingga data yang negatifnya tidak dimasukkan. Karena menurut mereka yang penting data yang positif agar bisa diisolasi," kata Menkes.

Menurutnya, itu menjadi penyebab *positivity rate* naik. "Itu adalah salah satu hipotesa yang kami amati dan kami akan uji," lanjutnya. Karena itu, Kemenkes sudah memperbaiki *user interface* untuk aplikasi testing tersebut, sehingga akan memudahkan semua laboratorium/rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan untuk memasukkan laporannya. (Ati)-f

75 KALURAHAN DI BANTUL

Miliki Posko dan Shelter Isolasi

YOGYA (KR) - Sebanyak 75 kalurahan/desa di Kabupaten Bantul telah memiliki Posko Tanggap Covid-19 maupun shelter isolasi warga terkonfirmasi positif Covid-19. Dari sekitar 9.900-an Rukun Tetangga (RT), saat ini tidak ada yang masuk kategori zona merah. Ini merupakan realisasi Pembekalan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro yang telah dilaksanakan dengan baik.

"Bagi Pemkab Bantul, seluruh desa telah melaksanakan PPKM Mikro dengan baik. Regulasi untuk melakukan PPKM Mikro di tingkat desa, padukuhan dan RT itu sesuai

Instruksi Bupati Bantul No 5 Tahun 2021," tutur Sekda Bantul Helmi Jamharis usai ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bantul di Bangsal Kepatihan Yogyakarta, Rabu (17/2).

Helmi mengatakan, Posko Tanggap Covid-19 Kalurahan dimaksudkan untuk menampung informasi sekaligus menindaklanjuti keluhan warga, di samping melaksanakan monitoring, pengendalian serta edukasi kepada warga.

"Semua desa/kalurahan di Bantul sudah membentuk posko tersebut. Dalam struktur organisasinya lurah desa sebagai Ketua Posko Tanggap Covid-19. Keberadaan posko terse-

but dikuatkan dengan Surat Keputusan Lurah Desa," tandasnya.

Helmi menuturkan, setiap kalurahan juga telah mempunyai shelter isolasi untuk menampung pasien positif Covid-19 yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri. Shelter isolasi ini memiliki kapasitas berbeda sesuai kemampuan dan sarana masing-masing desa.

"Keberadaan shelter tersebut tidak serta merta berdiri sendiri, tetapi ada supervisi oleh Puskesmas, sehingga ada pedoman yang harus dilaksanakan seandainya shelter tersebut dimanfaatkan warga dalam rangka isolasi," imbuhnya. (Ira/Ria)-f

USULAN REVISI UU ITE MENCUAT

Baleg DPR: Ada Mekanisme yang Harus Ditempuh

JAKARTA (KR) - Terdapat mekanisme yang harus ditempuh jika ingin memasukkan revisi UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Keinginan memasukkan revisi UU ITE sempat mencuat setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan, dirinya bisa meminta DPR untuk merevisi UU ITE, jika penerapan produk legislasi tersebut tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin, yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (15/2) malam.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI

Achmad Baidowi menjelaskan, revisi UU ITE masuk Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 Nomor urut 7 usulan DPR, bukan masuk Prolegnas Prioritas 2021. "Terhadap keinginan memasukkan revisi UU ITE dalam Prolegnas Prioritas 2021 setidaknya ada jalur sebagaimana diatur UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP)," kata Baidowi di Jakarta, Rabu (17/2).

Baidowi mengatakan, Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR bersama Menkumham dan DPD pada 14 Januari 2021 telah menetapkan daftar Prolegnas Prioritas 2021 dan daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. Raker Baleg pada 14 Januari tentang

pengesahan Prolegnas 2021 sudah pernah dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwalkan di Rapat Paripurna, namun masih mengalami penundaan.

Oleh karena itu, menurut Baidowi, bisa saja Bamus menugaskan Baleg untuk raker ulang dengan mengubah prolegnas prioritas, yakni bisa menambah, mengurangi ataupun mengganti daftar RUU. "Atau bisa juga nanti di paripurna diputuskan. Namun, perlu ditegaskan, keputusan prolegnas harus dibuat dalam rapat tripartit antara DPR, pemerintah dan DPD," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini menilai tidak keberatan terhadap keinginan Presiden untuk merevisi UU ITE. Bahkan, untuk menunjang profesionalitas Polri seperti yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat uji kelayakan di Komisi III DPR. (Ant)-f



KR-Surya Adi Lesmana

IKON BARU PARIWISATA: Pengendara melintas di depan kawasan Rest Area Gerbang Samudera Raksa di Klangon, Banjoraya, Kalibawang, Kulonprogo, Rabu (17/2). Sejak selesai dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai petunjuk wisatawan yang masuk dari Bandara Internasional Yogyakarta sekaligus gerbang menuju kawasan Candi Borobudur, ikon baru pariwisata di perbatasan DIY-Jawa Tengah ini selalu ramai dikunjungi masyarakat.

OMBUDSMAN DIY SILATURAHMI SULTAN Minta Penjelasan Pergub No 1/2021

YOGYA (KR) - Ombudsman DIY bersilaturahmi ke Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis Kompleks Kepatihan, Rabu (17/2). Salah satu tujuan dari pertemuan tersebut mendapatkan penjelasan dan mendengarkan latar belakang, filosofi, histori, yuridis serta sosiologis terkait penyusunan Pergub Nomor 1 Tahun 2021.

Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari adanya aduan yang dilaungkan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) kepada Ombudsman DIY.

"Kedatangan kami kali ini selain untuk silaturahmi juga mendengarkan latar belakang filosofis, historis, yuridis, dan sosiologis dari perumusan Pergub tersebut. Gubernur DIY secara gamblang terbuka menjelaskan apa latar belakang dan apa yang sudah dilalui dalam proses penyusunan kebijakan itu," kata Kepala ORI DIY Budhi Masthuri, se usai bersilaturahmi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Kompleks, Rabu (17/2).

Adapun isi Pergub tersebut menyebutkan bahwa demonstrasi hanya bisa dilakukan pada radius 500 meter dari titik terluar Istana Negara Gedung Agung, Kraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, Kawasan Cagar Budaya Kotagede, dan Kawasan Malioboro.

Budi mengungkapkan, berdasarkan penjelasan dari Pemda DIY, Ombudsman akan melakukan kajian lebih dalam untuk menentukan apakah Pergub tersebut memang bermasalah atau tidak. Karena kalau Ombudsman melihat lebih dari sisi pelayanan publik apakah Pergub itu berimplikasi pada pelayanan publik dalam konteks hak-hak aspirasi warga atau tidak. (Ria)-f

SEBAIKNYA DIHUKUM SEUMUR HIDUP

Dua Mantan Menteri Terjerat Dugaan Suap

JAKARTA (KR) - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, tersangka Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara yang terjerat kasus dugaan suap sebaiknya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dikenai tindak pidana pencucian uang (TPPU) ketimbang dihukum mati. Sementara KPK menyatakan, sangka pasal yang diterapkan atas kasus suap perizinan ekspor benih lobster (benur) dan pengadaan bantuan sosial (bansos) saat ini masih berkaitan dengan dugaan penerimaan suap.

"Penanganan perkara oleh KPK dalam perkara dugaan suap benur di KPK dan bansos di Kemensos, saat ini pasal yang diterapkan terkait dugaan suap yang ancaman hukuman maksimalnya sebagaimana ketentuan UU Tipikor adalah pidana penjara seumur hidup," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/2).

Ia mengatakan demikian sebagai respons KPK atas adanya wacana tuntutan mati terhadap tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap benur dan mantan Mensos Juliari Peter Batubara terkait perkara suap bansos. KPK, lanjut Ali, me-

mahami harapan masyarakat terkait penyelesaian kedua kasus tersebut, termasuk soal hukuman bagi para pelakunya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga membenarkan, secara normatif dalam UU Tipikor terutama Pasal 2 ayat (2) hukuman mati diatur secara jelas ketentuan tersebut dan dapat diterapkan.

"Tetapi bukan hanya soal karena terbukanya unsur ketentuan keadaan tertentu saja untuk menuntut hukuman mati, namun tentu seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) juga harus terpenuhi," jelas Ali.

Selain itu, ia menyampaikan tentang hasil tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait dua kasus tersebut diawali dengan penerapan pasal-pasal dugaan suap.

Meski demikian, Ali memastikan, pengembangan kasus itu sangat dimungkinkan seperti penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor bahkan penerapan ketentuan UU lain seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini, tegasnya, sejauh ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penerapan seluruh unsur pasal-pasal dimaksud.

"Oleh karena itu, proses penyidikan kedua perkara tersebut sampai saat ini masih terus dilakukan," kata Ali. (Ful)-f

Lembaga Pendidikan Harus Berorientasi Mutu

YOGYA (KR) - Lembaga pendidikan harus berorientasi pada kualitas mutu dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Aspek publikasi dan marketing juga menjadi penting dalam mewujudkan cita-cita, tentu saja melalui tata kelola perguruan tinggi baik pada level universitas maupun fakultas.

Pernyataan tersebut disampaikan Rektor Universitas Widy Mataram (UWM), Prof Dr Edy Suandi Hamid MEC pada sambutan acara Rapat Senat Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UWM dalam rangka Dies Natalis Pertama, Rabu (17/2) secara virtual melalui aplikasi Zoom. Acara diikuti pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

"Small is beautiful, but bigger is better. FST harus berupaya menjadi lebih besar dari saat ini. Tata kelola yang baik pada lembaga tergantung pada kepemimpinan yang kompeten, mampu mempengaruhi yang lain, berintegritas dan memiliki komitmen," terang Prof Edy Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2008-2009 itu.

Menurutnya, pimpinan harus mampu memberikan stimulus kepada sivitas terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Keteladanan seorang pimpinan menjadi pilar penting dalam mewujudkan cita-cita perguruan tinggi dengan memiliki management skill, academic skill, skill of thinking, dan communication skills.

"Di samping mengawal kinerja akademik dan norma akademik, marketing harus ditingkatkan sehingga semua prodi menjadi salesman untuk menjangkau mahasiswa," tutur Pakar Ekonomi itu. (Jon)-f